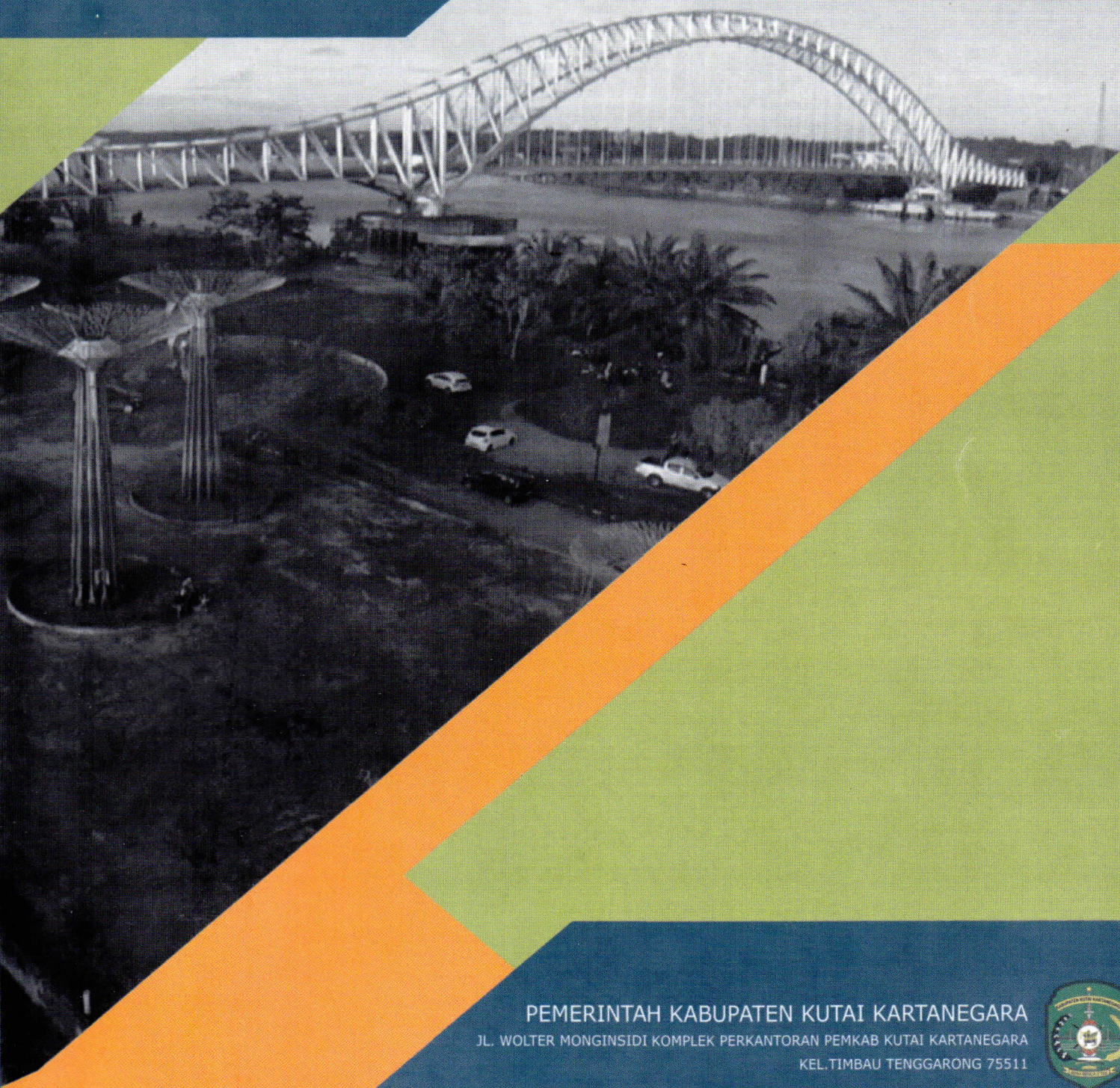


Perubahan
**RENCANA STRATEGIS
B A P P E D A
TAHUN 2016-2021**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
JL. WOLTER MONGINSIDI KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB KUTAI KARTANEGARA
KEL. TIMBAU TENGGARONG 75511



PERUBAHAN

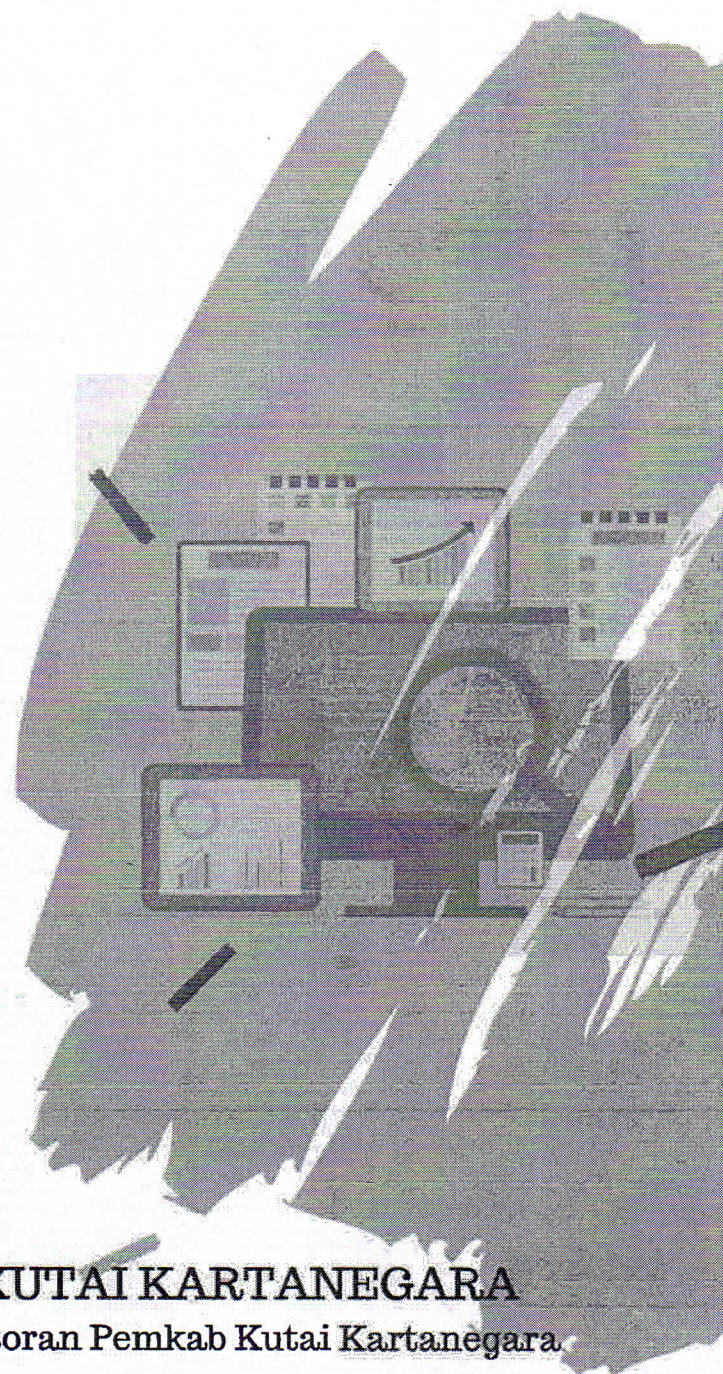
RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH**

2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Kartanegara
Kel. Timbau Tenggarong



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra ini merupakan bagian dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 sebagai implikasi dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru.

Selain itu juga Rencana Strategis bertujuan menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah (lima tahunan) guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Demikian Dokumen Rencana Strategis ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi acuan dalam urusan perencanaan.

Tenggarong, 2019

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Wiyono, S.I.P, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690204 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1. LANDASAN HUKUM	2
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	6
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA	6
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA	6
1.1.1 Tugas.....	6
1.1.2 Fungsi	6
2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA.....	9
2.2.1 Sumber Daya Manusia	9
2.2.2 Sarana Dan Prasarana	10
2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA	14
2.4 PELAKSANAAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA.....	17
2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA.....	25
2.5.1 Tantangan.....	25
2.5.2 Peluang.....	25
BAB III	26
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA.....	26
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI PELAYANAN.....	26
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, & PROGRAM KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	27
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN TELAAHAN RENSTRA PROVINSI.....	29
3.3.1 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).....	29
3.3.2 Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur	30
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	31
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	31
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	37



BAB IV	38
TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1 TUJUAN.....	38
4.2 SASARAN.....	39
BAB V	42
STRATEGI DAN KEBIJAKAN	42
5.1 STRATEGI 1 PENINGKATAN KAPASITAS BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	42
5.2 STRATEGI 2 PENGUATAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU	42
5.3 STRATEGI 3 PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	43
BAB VI	45
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
7.1 Rencana Program dan Kegiatan	47
BAB VII	72
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	72
BAB VIII.....	74
PENUTUP	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Barang BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara	11
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara	15
Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	17
Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara	18
Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	19
Tabel 6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah	26
Tabel 7. Pelayanan Bappeda terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	29
Tabel 8. Sasaran Renstra Bappenas terhadap Pelayanan Bappeda.	30
Tabel 9. Pelayanan PD Bappeda berdasarkan Telaah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	31
Tabel 10. Kebijakan, Rencana dan Program berdasarkan Urusan.....	32
Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	40
Tabel 13. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	43
Tabel 14. Rencana Program dan Strategi Pertama	47
Tabel 15. Rencana Program dan Kegiatan Strategi Kedua.....	47
Tabel 16. Rencana Program dan Kegiatan Strategi Ketiga	48
Tabel 17. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	49
Tabel 18. Indikator Kinerja Perangkat Daerah	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara	8
Gambar 2. Jabatan dan Tingkat Pendidikan ASN BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Gambar 3. Jumlah ASN BAPPEDA Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Komposisi Pegawai	10
Gambar 4 Keterkaitan Tujuan Bappeda dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.....	39
Gambar 5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD dan Renstra Bappeda	41
Gambar 6. Kerangka Logis Keterkaitan RPJMD dengan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 272 mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 72 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi : a). Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang perencanaan, b). Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di bidang perencanaan, c). pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, e). pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2018. Dalam perkembangannya terdapat perubahan regulasi, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 342 ayat 1 Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila : hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai



dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini;

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 30 Tahun 2016, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, berimplikasi pada perubahan Dokumen untuk disesuaikan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara langsung berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku *mutatis mutandis* terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 menjabarkan perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, dilakukan dengan memformulasikan secara linear atas perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Bappeda dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, Perubahan Renstra Bappeda juga dilakukan perumusan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang lebih terukur guna akselerasi pencapaian Visi dan Misi daerah sesuai dengan RPJMD.

1.1 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan hukum dalam Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 17);



16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21).
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2014, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renstra Bappeda disusun dengan maksud untuk menyesuaikan perubahan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan yang tertuang dalam perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dalam upaya percepatan pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016–2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020-2021 BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Sebagai instrumen untuk pengendalian pelaksanaan Perubahan Renstra BAPPEDA 2016-2021 dan sebagai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda tahun 2020 dan 2021.



1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 disusun dengan sitematika:

BAB I	PENDAHULUAN
	1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
	1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2. Sumber Daya BAPPEDA 3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA
	1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi BAPPEDA 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD 5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	1. Tujuan 2. Sasaran
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	1. Strategi 2. Arah Kebijakan
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1.TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah, dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1.1.1 Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2016 tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari :

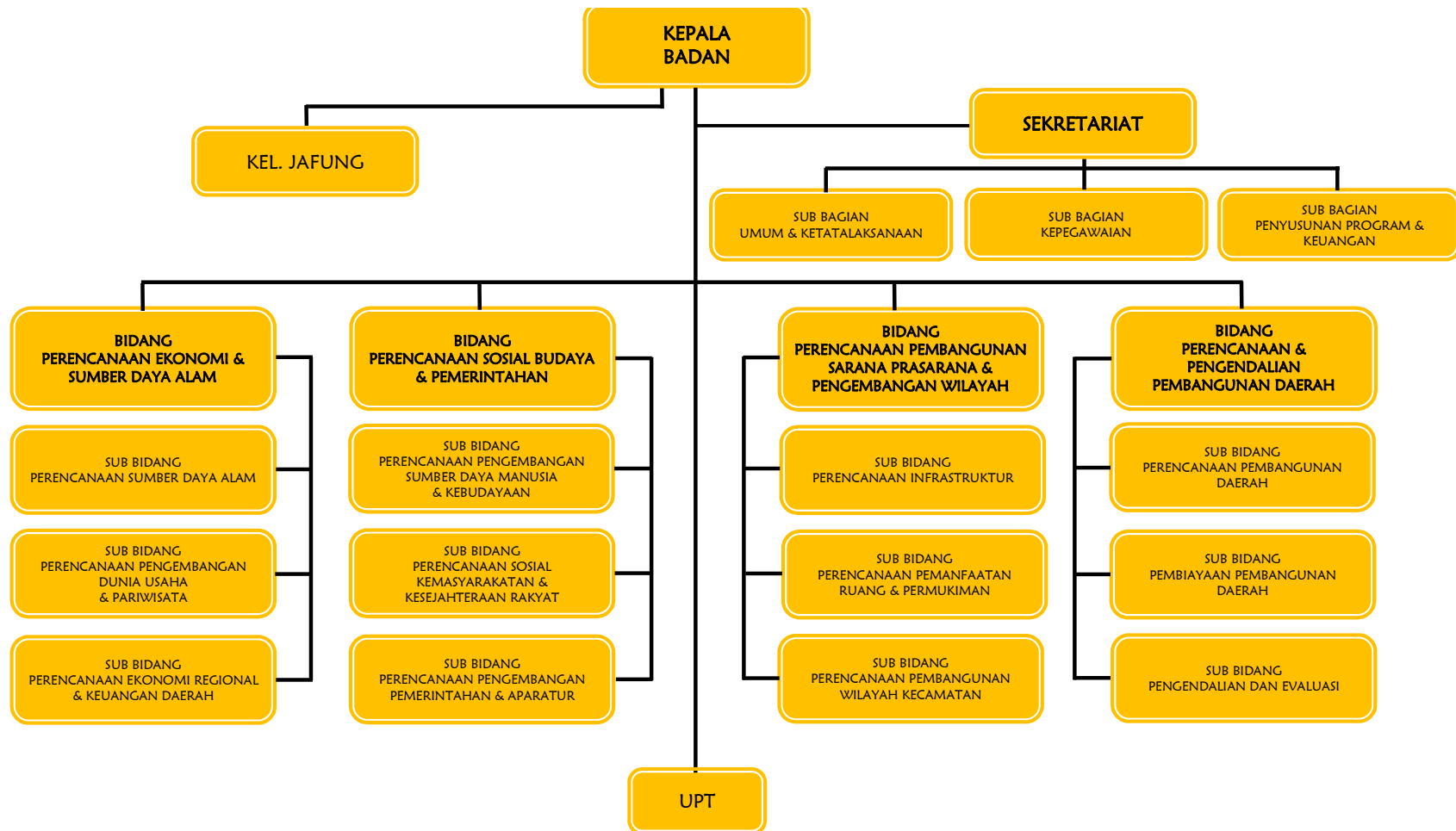


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah.
- d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya Dan Pemerintahan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kebudayaan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur.
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan.
- f. Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara



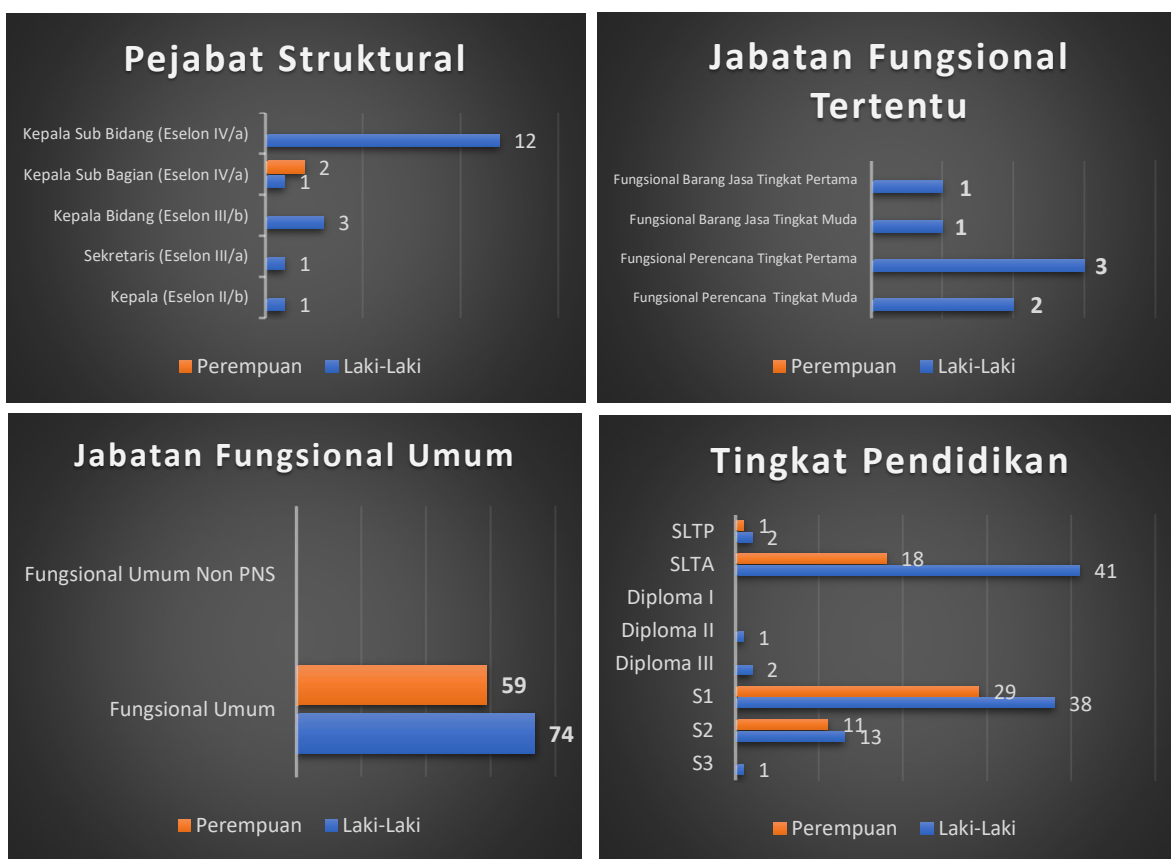
2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di BAPPEDA. Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 sebanyak 160 orang. Penjelasan mengenai pegawai BAPPEDA disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Gambar 2. Jabatan dan Tingkat Pendidikan ASN BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin



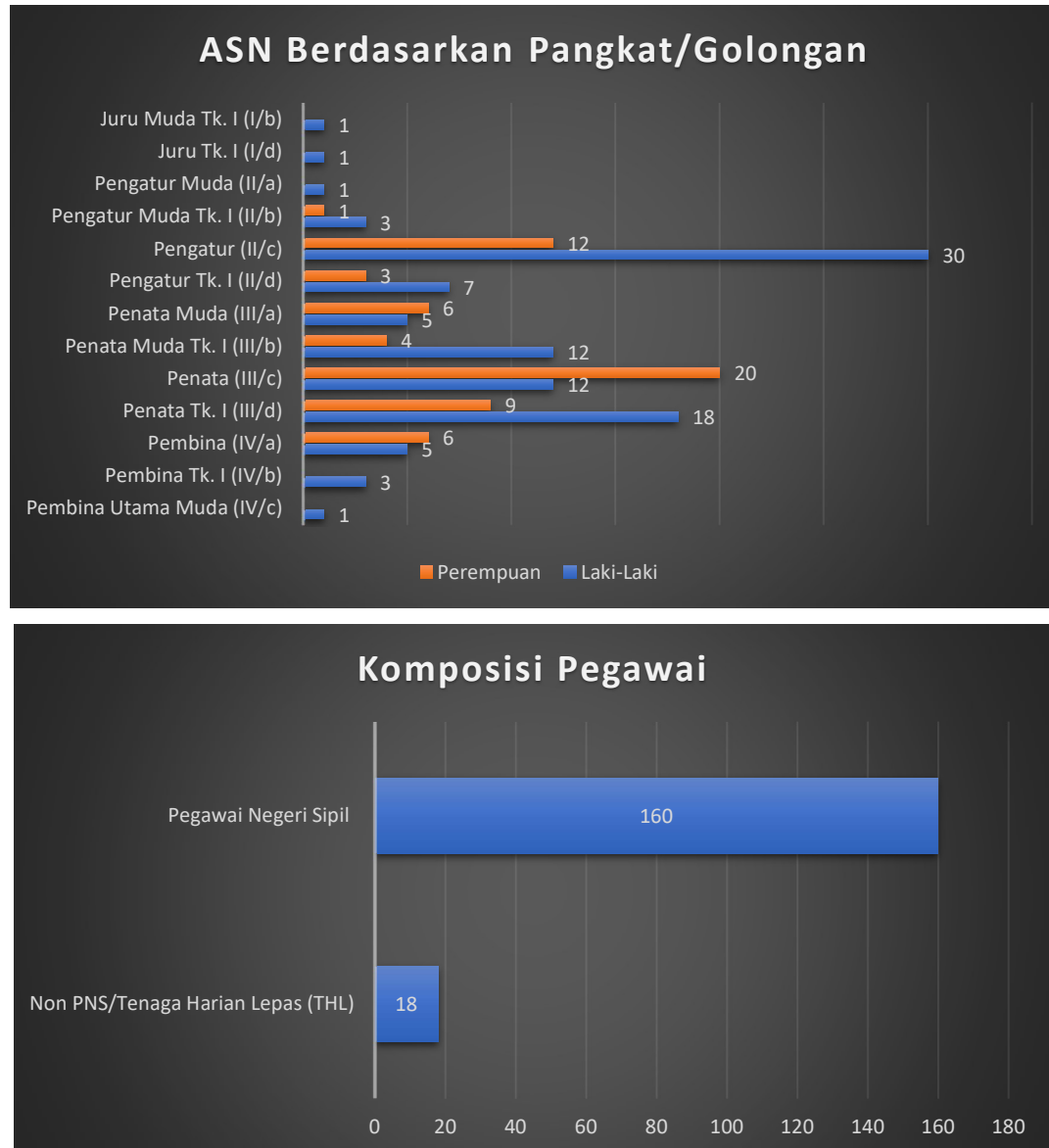
Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BAPPEDA, Per Juni 2018

Berdasarkan data pada infographic diatas, diketahui bahwa ASN BAPPEDA yang berpendidikan S1 dan SLTA memiliki jumlah paling banyak yaitu masing-masing 67 dan 59 orang. Sedangkan ASN yang



berpendidikan S2 sebanyak 24 orang. ASN berdasarkan pangkat/golongan disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 3. Jumlah ASN BAPPEDA Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Komposisi Pegawai



Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BAPPEDA, Per Juni 2018

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1. Daftar Barang BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2017**

No	Nama Barang	Jumlah
A.	Alat-alat Angkutan 102	
1	Station Wagon	4
2	Kendaraan Dinas Esselon II	1
3	Kendaraan Dinas Esselon III	5
4	Pick Up	3
5	Sepeda Motor	65
6	Scooter	24
B.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	Global Positioning System	3
2	Scanner	2
3	Air Conditioning Unit	10
4	Compresor Unit	1
C.	Lemari	
1	Lemari Penyimpanan	1
D.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
2	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	2
3	Mesin Ketik Elektronik	1
4	Mesin Hitung Elektronik	1
5	Mesin Calculator	5
6	Mesin Penghitung Uang	2
7	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	1
8	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2
9	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	3
10	Lemari Besi	43
11	Rak Besi/Metal	18
12	Rak Kayu	3
13	Filling Besi/Metal	10
14	Band Kas	11
15	Peti Uang	8
16	Papan Visuil	1
17	Perkakas Kantor	94
18	Alat Pengamatan/Sinyal	20
19	Alat Penghancur Kertas	14
20	Papan Nama Instansi	1
21	White Board	8
22	Mesin Absensi	4
23	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	28
24	Partisi	2
25	Lemari Kayu	94
26	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	5
27	Meja Rapat	42

No	Nama Barang	Jumlah
28	Meja Tulis	16
29	Meja Makan	5
30	Meja Reseption	3
31	Meja Tambahan	39
32	Meja Panjang	2
33	Kursi Rapat	81
34	Meja Komputer	7
35	Sofa	48
36	MOUBILER LAINNYA	1
37	Jam Elektronik	27
38	Mesin Penghisap Debu	1
39	Alat Pembersih Lain-lain	36
40	Lemari Es	6
41	AC Unit	10
42	AC Split	1
43	Kipas Angin	6
44	Alat Dapur Lainnya	406
45	Alat Dapur Lainnya	441
46	Alat Dapur Lain-lain	402
47	Televisi	18
48	Sound System	3
49	Wireless	2
50	Unit Power Supply	1
51	Camera Film	2
52	Tustel	10
53	Lambang Garuda Pancasila	11
54	Gambar Presiden/Wakil Presiden	11
55	Lift	2
56	Dispenser	10
57	Mimbar/Podium	1
58	Handy Cam	14
59	Alat Rumah Tangga Lain-lain	74
60	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	1
61	Bola Api	6
62	Tanaman Hias Leven Bangkok	10
63	Tanaman Hias Kamedunia	10
64	Tanaman Hias Leven Palm Phoenix	5
65	Tanaman Hias Cemara Aentes	5
66	P.C Unit	146
67	Note Book	201
68	Personal Komputer Lain-lain	1
69	Hard Disk	13
70	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1



No	Nama Barang	Jumlah
71	CPU	1
72	Printer	89
73	Scanner	9
74	Monitor	14
75	Printer	109
76	Scanner	4
77	External	17
78	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	75
79	Server	2
80	Hub	1
81	Peralatan Jaringan Lain-lain	22
82	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
83	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18
84	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	288
85	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	12
86	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2
87	Meja Maket/Peta	1
88	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
89	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
90	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17
91	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	511
92	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10
93	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	94
94	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	4
95	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	20
96	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1
E.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1	Camera + Attachment	2
2	Proyektor + Attachment	41
3	Audio Logging Recorder	7
4	Microphone/Wireless Mic	4
5	Power Supply Microphone	5
6	Professional Sound System	2
7	Unintemuptible Power Supply (UPS)	33
8	Digital Audio Tape Recorder	1
9	Peralatan studio Visual Lain-lain	23
10	Camera Electronic	28
11	Video Monitor	3
12	Camera Film	1
13	Lensa Kamera	2
14	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	20
15	Mesin Jilid	1
16	Compas Geologi	2



No	Nama Barang	Jumlah
17	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	10
18	Facsimile	2
19	Alat Komunikasi Lain-lain	2
F.	Alat Laboratorium	
1	Personal Komputer	5
2	Papan Panel	1
3	Layar	3
4	Pot Besar	30
5	Generator Set (Lab Scale)	3
6	Sum Invert Amplifier	1

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian BAPPEDA, 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra BAPPEDA periode tahun lalu (2011-2016), maka diketahui bahwa pada umumnya memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi, dan sebagian lagi memiliki kinerja tinggi. Hanya sebagian kecil yang memiliki tingkat capaian kinerja yang sedang. Hal ini disajikan di Tabel 2.5 yang memuat capaian kinerja BAPPEDA lima tahun terakhir.

Selain pencapaian kinerja BAPPEDA mulai Tahun 2013 sampai 2017, perlu disajikan juga kinerja pengelolaan keuangan BAPPEDA. Berdasarkan data yang ada sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6 diketahui bahwa rasio anggaran dan realisasi belanja langsung BAPPEDA selama 6 (enam) tahun terakhir fluktuatif yaitu berkisar 76% sampai 83%. Dengan tingkat kinerja yang pada umumnya sangat tinggi dan disisi lain terdapat penyerapan anggaran yang belum optimal, maka perlu dilakukan perbaikan pada tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga penentuan target kinerja dapat berbanding lurus dengan pagu anggaran yang dibutuhkan. Diperlukan penghitungan pagu yang sesuai dengan standar satuan harga, sehingga perencanaan anggaran lebih efisien dan efektif.



**Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2013-2017**

No.	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100	100	100	60		91,68	100	100	-	-	92%	100%	100%	-	-
2	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100	83,6	95,91	99,54	98,71	96,46	84%	96%	100%	99	96
3	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur				100	100	100	100	100	100	97,07	99,93	100	69,41	100%	97%	100%	100	69
4	Tingkat Kepatuhan aparatur				100	100	100	75		93,2	93,86	97,2	97,98		93%	94%	97%	131	
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100	100
6	Cakupan lembaga perencana yang terbina				80	80	-	-	-	88	92	-	-	-	110%	115%	-	-	-
7	Jumlah Desa Mandiri perencanaan				36	72	-	-	-	36	193	-	-	-	100%	268%	-	-	-
8	Jumlah Realisasi Kerjasama Pembangunan				5	5	-	-	-	5	5	-	-	-	100%	100%	-	-	-
9	Persentase Keselarasan antara program dan kegiatan di Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Sasaran RKPD				90	90	90	-	-	95	95	95,5	-	-	106%	106%	106%	-	-
10	Persentase Keselarasan antara RPJMD dan RKPD				-	-	-	70	75	-	-	-	79,02	70	-	-	-	113	93
11	Tingkat capaian Kinerja Fisik Pembangunan Daerah				-	-	-	75	75	-	-	-	78,32	82,12	-	-	-	104	109
12	Indek Partisipasi Masyarakat				-	-	-	--	4	-	-	-		5	-	-	-	-	125
13	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi				90	90	90	75	78	85	91,26	90,45	80,71	86,07	94%	101%	101%	108	110



No.	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
14	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya (Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesra)				80	90	90	75	78	92	94,68	92,07	85,58	99,25	115%	105%	102%	114	127
15	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur				80	85	87	75		95	96,85	95,21	90,6	--	119%	114%	109%	121	
16	Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah				90	90	90	75	78	89	93,14	90,78	82	77	99%	103%	101%	109	99
17	Cakupan Dokumen Statistik Daerah (14 Dokumen)				80	85	87	12		78	90	100	12		98%	106%	115%	100	
18	Cakupan Dokumen/Aplikasi Data dan Informasi Daerah (7 Sistem Informasi)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100	100
19	Tingkat Ketersediaan Data Pembangunan				-	-	-	40	45	-	-	-	40	45	-	-	-	100	100



Dari total 19 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA, hampir seluruh target pada Renstra sudah tercapai, bahkan di beberapa Indikator Realisasi Capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan. Contohnya pada Indikator Cakupan lembaga perencanaan yang terbina, Persentase Keselarasan antara program dan kegiatan di Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Sasaran RKPD, dan capaian Kinerja pada seluruh Bidang Perencanaan. Dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kutai Kartanegara sangat baik.

2.4 PELAKSANAAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Daya serap anggaran terhadap realisasi harus seimbang jangan sampai ada besar pasak daripada tiang. Berikut ini adalah gambaran anggaran dan realisasi belanja langsung BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017

Tahun	Besaran Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)
2013	65.997.696.380	50.206.022.531	76,07
2014	32.422.595.609	25.228.731.447	77,81
2015	27.996.912.669	23.276.840.687	83,14
2016	21.674.085.529	17.682.338.671	81,58
2017	18.832.943.736	13.861.103.282	73,60

Berdasarkan tabel diatas, Kinerja pengelolaan keuangan BAPPEDA dari Tahun 2013 sampai 2017, diketahui bahwa rasio anggaran dan realisasi belanja langsung BAPPEDA selama 6 (enam) tahun terakhir fluktuatif yaitu berkisar 73% sampai 83%. Dengan tingkat kinerja yang pada umumnya sangat tinggi dan disisi lain terdapat penyerapan anggaran yang belum optimal.



**Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2013- 2017**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (ribu)					Realisasi Anggaran pada Tahun (ribu)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Gaji Pokok PNS	6.344.956.425	7.184.251.125	7.571.954.186	8.532.712.125	7.561.234.247	6.340.954.400	6.690.105.800	7.068.856.300	7.544.731.300	7.181.032.100	100	93	93	88	95
2	Tunjangan Keluarga	765.435.148	1.042.143.300	693.629.830	760.089.868	647.583.130	576.441.116	6.320.284	649.540.028	645.621.278	606.394.402	75	1	94	85	94
3	Tunjangan Jabatan	429.463.125	307.856.250	245.021.765,63	246.592.500	217.325.625	243.995.000	210.175.000	199.745.000	187.865.000	182.465.000	57	68	82	76	84
4	Tunjangan Fungsional Umum	608.180.625	519.512.500	435.552.609	453.941.250	402.035.750	393.525.000	387.545.000	382.270.000	370.810.000	328.995.000	65	75	88	82	82
5	Tunjangan Beras	420.831.250	530.278.125	543.787.920	527.132.067	470.333.201	383.286.480	441.162.240	445.028.500	440.603.280	413.300.940	91	83	82	84	88
6	Tunjangan PPh/Tunj Khusus	328.594.368	365.966.250	138.428.660	180.500.886	90.838.569	171.836.904	96.626.477	126.626.002	92.209.348	3.948.298	52	26	91	51	4
7	Pembulatan Gaji	881.420	15.112.500	174.932	249.838	131.307	124.847	115.758	116.640	126.507	107.575	14	1	67	50	82
8	Tambahan penghasilan (TPP)	5.871.185.387	7.781.370.000	7.944.540.000	7.540.283.685	6.172.859.790	4.146.915.251	6.596.216.214	6.625.519.807	7.269.027.956	5.572.476.939	71	85	83	96	90
9	Tunjangan Fungsional	-	-	94.700.000	80.508.750	66.088.925	-	-	40.725.000	47.700.000	60.703.000	-	-	43	59	92
10	Iuran BPJS Kesehatan	-	-	77.055.735	277.747.568	265.847.954	-	-	53.897.842	211.545.872	201.928.626	-	-	70	76	76
11	Tunjangan JKK	-	-	-	20.816.156	19.585.807	-	-	-	15.494.407	14.790.264	-	-	-	74	76
12	Tunjangan JKM	-	-	-	25.470.196	24.533.523	-	-	-	19.367.476	18.487.851	-	-	-	76	75
Jumlah		14.769.527.748	17.746.490.050	17.744.845.638	18.646.044.889	15.938.397.829	12.257.078.998	14.428.266.773	15.592.325.119	16.845.102.424	14.584.629.992	83	81	88	90	92



**Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013- 2017**

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.988.674.500	148.537.100	1.125.080.000	-	-	3.703.048.550	121.438.300	884.805.875	-	-	74	82	79	-	-	2.087.430.533	78
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.547.344.440	4.295.145.220	4.414.986.304	4.448.749.079	4.235.333.928	4.746.247.513	3.117.146.580	3.619.725.260	3.820.133.130	3.515.158.813	72	73	82	86	83	4.788.311.794	79
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.661.492.890	2.779.134.582	4.648.210.017	1.750.861.600	1.297.475.065	2.873.047.206	2.127.633.690	4.119.063.048	1.328.460.096	804.348.202	78	77	89	76	62	2.827.434.831	76
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	635.647.600	-	-	-	-	622.297.600	-	-	-	-	98	-	-	-	-	635.647.600	98
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.802.420.900	288.608.857	214.425.600	670.000.000	670.000.000	1.503.438.800	232.955.350	174.741.900	396.016.114	638.243.250	83	81	81	59	95	729.091.071	80
Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik	8.006.539.000	843.000.000	427.300.000	1.200.000.000	-	5.972.863.967	698.409.800	386.947.323	827.421.190	-	75	83	91	69	-	2.619.209.750	80
Program Pengembangan Data dan Informasi	115.989.100	5.910.848.000	1.892.400.000	800.000.000	800.000.000	115.989.100	5.128.471.162	1.714.058.222	622.855.000	718.399.500	100	87	91	78	90	1.903.847.420	89
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	13.868.010.900	-	-	-	-	11.586.747.502	-	-	-	-	84	-	-	-	-	13.868.010.900	84

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	298.945.800	1.649.282.500	-	-	-	177.471.900	1.179.388.832	-	-	-	59	72	-	-	-	974.114.150	66
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8.235.402.250	7.658.357.350	8.103.676.999	7.062.277.000	5.121.044.687	4.664.160.747	5.853.474.197	6.769.897.414	5.765.682.082	4.102.696.003	57	76	84	82	80	7.236.151.657	76
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	9.970.028.000	651.282.000	1.696.000.000	950.000.000	750.000.000	8.398.010.046	497.455.100	1.376.275.656	827.943.500	737.272.667	84	76	81	87	98	2.803.462.000	85
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	5.411.500.000	1.812.500.000	1.629.000.000	2.050.000.000	2.900.000.000	4.057.867.300	1.137.564.800	1.444.565.900	1.850.186.180	2.092.549.233	75	63	89	90	72	2.760.600.000	78
Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur.	1.950.000.000	350.000.000	1.109.833.750	1.450.000.000	499.689.306	1.494.274.000	269.321.400	815.634.900	1.149.792.654	314.814.922	77	77	73	79	63	1.071.904.611	74
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	-	-	1.486.000.000	2.410.258.500	2.559.400.750	-	-	1.098.072.138	1.669.410.175	937.620.692	-	-	74	69	37	2.151.886.417	60
Program Desa Mandiri Perencanaan	500.000.000	911.165.000	-	-	-	284.857.300	546.086.300	-	-	-	57	60	-	-	-	705.582.500	59
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	5.701.000	-	-	-	-	5.701.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	5.701.000	100
Program Perencanaan Tata Ruang	3.010.000.000	3.010.000.000	1.250.000.000	-	-	2.303.704.261	2.303.704.261	873.053.051	-	-	77	77	70	-	-	2.423.333.333	75



Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		1.792.801.000	-	-	-	-	1.654.442.000	-	-	-	-	92	-	-	-	1.792.801.000	92
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana		321.934.000	-	-	-	-	262.125.150	-	-	-	-	81	-	-	-	321.934.000	81



2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA

2.5.1 Tantangan

Dalam rangka pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Bappeda sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah memberi pelayanan dalam proses perencanaan dengan wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pembinaan dibidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Perubahan Kebijakan Perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*.
2. Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.
3. Hasil-hasil kajian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
4. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja, dan database Bappeda.

Tantangan yang ada saat ini menjadi perhatian serius BAPPEDA dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kutai Kartanegara.

2.5.2 Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, BAPPEDA juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain:

1. Instrumen regulasi berupa dukungan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 guna meningkatkan sinkronisasi proses perencanaan dan pembangunan di daerah
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pelaporan (SIMRAL) dan upaya peningkatan aktifitas dan efisiensi proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Memperkuat sinergi antara Bappeda dan BPKAD yang secara bersama-sama memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan konsisten dengan rencana.
4. Rekrutmen SDM perencana melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
5. Dukungan program dan kegiatan berasal dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) perencanaan pembangunan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

Permasalahan yang dihadapi Bappeda saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan dapat menghasilkan program dan kegiatan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah langkah kongkrit dalam implementasi pembangunan, dan strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI PELAYANAN

Bappeda berfungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengoordinasian, pembinaan bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAPPEDA Bappeda menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pencapaian pembangunan daerah	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan kinerja aparatur	Belum optimalnya dukungan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana
			Belum maksimalnya kapasitas dan tertib administrasi SDM Aparatur
			Belum optimalnya sistem dalam prosedur pelaporan, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
		Belum optimalnya penyelenggaraan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu	Belum optimalnya kualitas perencanaan, pembiayaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
			Belum optimalnya konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
			Belum optimalnya implementasi regulasi sistem perencanaan pembangunan daerah



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Belum maksimalnya penggunaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi
			Belum optimalnya koordinasi kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah
			Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
		Belum optimalnya capaian kinerja perangkat daerah	Belum selarasnya kebijakan pembangunan terhadap hasil capaian kinerja di bidang Ekonomi dan SDA
			Belum selarasnya kebijakan pembangunan terhadap hasil capaian kinerja di bidang Sosial Budaya dan Pemerintah
			Belum selarasnya kebijakan pembangunan terhadap hasil capaian kinerja di bidang sarana prasarana Pengembangan Wilayah

3.2 TELAHAH VISI, MISI, & PROGRAM KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, yaitu:

**“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri,
Sejahtera, dan Berkeadilan”**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

MAJU:

Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

MANDIRI:

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal



dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

SEJAHTERA:

Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN:

Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

Upaya mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak

Berkaitan dengan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, sebagai penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kutai Kartanegara, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait dengan Misi I “Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat”.

Pelayanan Bappeda dalam pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dijelaskan dalam Tabel berikut.



Tabel 7. Pelayanan Bappeda terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi :			
Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.			
No	Misi dan Program	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Misi I Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat Program Prioritas : ○ Program Perencanaan Pembangunan Daerah. ○ Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA. ○ Program Perencanaan Sosial Budaya. ○ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah.	1) Kurangnya SDM Perencana, disebabkan manajemen ASN belum berdasar pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi perencana. 2) Kurangnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan. 3) Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.	1) Kebijakan peningkatan dan penguatan kapasitas SDM Bappeda. 2) Membangun sistem monitoring dan evaluasi sebagai basis penyusunan perencanaan. 3) Semakin strategisnya peran perencanaan sebagai konsistensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah (PD) Provinsi Tahun Rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan peluang pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan dan pilihan Kebijakan Strategis dalam Renstra Perangkat Daerah. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi serta untuk mencegah tumpang tindih Program dan Kegiatan antar Pemerintah atau K/L dengan Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam Perencanaan Pembangunan. Dalam Renstra Bappenas Tahun 2015-2019 dicantumkan bahwa Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu :

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.



Sasaran Strategis dari tujuan pertama yaitu terlaksananya pembangunan nasional, dan sasaran strategis dari tujuan kedua yaitu terwujudnya manajemen tata kelola pemerintahan di kementerian PPN/Bappenas.

Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dijelaskan pada table berikut:

Tabel 8. Sasaran Renstra Bappenas terhadap Pelayanan Bappeda.

Sasaran Renstra BAPPENAS	Pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Sasaran Renstra Bappenas dapat memberikan gambaran dukungan pencapaian sasaran Bappeda, namun ada perbedaan perodesasi dokumen.
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas	2. Belum Optimalnya perencanaan yang berprinsip Transformasi Birokrasi, mengingat koordinasi internal belum optimal. (<i>Business Process</i> perencanaan belum berjalan dengan optimal)

3.3.2 Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 tidak dilakukan telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, mengingat saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang dalam proses menyusun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023. Namun secara kelembagaan tetap dilakukan koordinasi antara Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menjaga Sinergitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah



3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033, mengatur struktur dan pola ruang melalui perencanaan yang disusun Bappeda untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang, mengordinasikan pembangunan lintas wilayah dalam lingkup Kabupaten.

Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda berdasarkan telaah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033, sebagai berikut :

Tabel 9. Pelayanan PD Bappeda berdasarkan Telaah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Telaah RTRW	Faktor		Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah
		Penghambat	Pendorong	
1	Pengembangan dan Optimalisasi Kawasan Pertanian	Beralihnya fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian berdampak pada penurunan produksi pangan	pengembangan agribisnis dan agroindustri sebagai sektor unggulan, dan pengelolaan lahan pasca tambang	penyusunan Road Map dan Rencana Aksi pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura
2	Pengembangan Pariwisata berwawasan Lingkungan	Kawasan Wisata belum dikembangkan sesuai potensi.	mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata	sinergi program pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
3	Mendorong pengembangan pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	kurang pendampingan terhadap pengembangan kawasan, baik pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	pengembangan kawasan pusat pelayanan dan kegiatan lokal sesuai dengan potensi dan daya dukungnya	kajian keterkaitan dan keterpaduan potensi antar wilayah
4	Peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung	adanya potensi permasalahan kelestarian lahan	adanya regulasi dan standar baku pemantauan lingkungan	perencanaan dan pengendalian program memperhatikan aspek lingkungan hidup dan target capaian



3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2018 pasal 23 disebutkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan KLHS RPJPD, pelaksanaan KLHS perubahan RPJMD dan perubahan RPJPD.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, diidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan dalam 5 (Lima) tema yaitu:

1. Isu Strategis Pengelolaan Pertambangan
2. Isu Strategis Lingkungan Hidup
3. Isu Strategis Infrastruktur
4. Isu Strategis Ekonomi dan Pertanian
5. Isu Strategis Kelautan dan Perikanan

Selaras dengan prinsip KLHS, Bappeda yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, membina perencanaan dan pengendalian pembangunan, perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran pembangunan yang direncanakan.

Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa kebijakan, rencana dan program (KRP), yang dinilai dalam KLHS memiliki dampak terhadap kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Kebijakan, Rencana dan Program berdasarkan Urusan

Indikasi Program	Dampak	SKPD	Rekomendasi
Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Program Pengembangan Perumahan	- Mengubah pola permukiman - Kegiatan alih fungsi lahan menjadi perumahan, memicu terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem - Menurunkan luas lahan pertanian di sekitar jalan primer dan sekunder	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Pembangunan Perumahan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, Standar bangunan dan gedung, dukungan prasarana dan sarana memadai serta aspek sosial melalui: - Konsolidasi tanah - Tetap memperhatikan aspek lingkungan
Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			



Indikasi Program	Dampak	SKPD	Rekomendasi
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	- Konflik Sosial dengan Masyarakat Konflik dengan pengusaha tambang dan perkebunan, Berpotensi merusak lingkungan karena, pemakaian material saat pelaksanaan konstruksi - Pemindahan masyarakat yang berada di sumber air baku agar sumber air baku terjaga kualitasnya - Gangguan lingkungan pada saat penataan fisik.	- Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air - BLH - PDAM - Bappeda	- Pelibatan semua stakeholder (pemerintah, masyarakat, pengusaha) dalam upaya konservasi sumberdaya air. - Integrasi program antar SKPD dalam upaya konservasi sumberdaya air. - Pengawasan terhadap penggunaan sumber daya air dengan eksploitasi. - Regulasi/Ijin pemanfaatan air tanah perlu mempertimbangkan daya dukung sumber daya air di wilayah sekitar.
Program Perencanaan Tata Ruang	- Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan dapat berakibat pada degradasi lingkungan - Konflik sosial dengan masyarakat - Konflik kepentingan dengan pengusaha tambang dan perkebunan	- Bappeda - Dinas Cipta Karya	- Penyusunan peraturan daerah tentang pemanfaatan ruang, misalkan LP2B - Sosialisasi pentingnya penegakan peraturan penataan ruang - Peningkatan partisipasi semua stakeholder dalam penyusunan tata ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	- Pemanfaatan sumberdaya yang tidak dikendalikan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan - Konflik sosial dengan masyarakat - Konflik kepentingan dengan pengusaha tambang dan perkebunan - Menurunnya investasi	- Bappeda - Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang - Sekretariat Daerah	- Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan hidup - Pengelolaan SDA memegang prinsip berkelanjutan, ramah lingkungan dan mensejahterakan masyarakat
Program Pengembangan Perumahan	- Alih fungsi lahan untuk permukiman memicu konversi lahan - Meningkatnya lahan terbangun - Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah - Meningkatkan kebutuhan air bersih - Meningkatkan volume sampah dan limbah - Memicu terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem - Menurunkan luas lahan pertanian di sekitar jalan primer dan sekunder	- Bappeda - Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	- Pembangunan perumahan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan - Pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan - Pemilihan lokasi perumahan diarahkan di lokasi non pertanian - Pembangunan Perumahan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, standar bangunan dan gedung, dukungan prasarana dan sarana memadai serta aspek sosial melalui: 1.Konsolidasi tanah 2.Tetap memperhatikan aspek lingkungan
Urusan Wajib Pangan			

Indikasi Program	Dampak	SKPD	Rekomendasi
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	- Konflik pemanfaatan lahan untuk pertambangan, pertanian, perumahan, dan pengembangan perkotaan - Peningkatan kebutuhan air irigasi - Peningkatan residu dari penggunaan pupuk kimia	- Bappeda - Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	- Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) - Membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian - Penggunaan teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan - Pengelolaan lahan pascatambang untuk kegiatan pertanian
Lingkungan Hidup			
Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Overlapping IUP dengan Kawasan Lindung Bawahan dan Kawasan Lindung Setempat - Intensifnya kegiatan pertambangan dapat berdampak pada menurunnya kualitas air dan tanah - Penurunan kualitas lingkungan baik air, tanah maupun udara yang akan dapat meningkatkan vector penyakit, menurunkan tingkat kesehatan/keselamatan	Badan Lingkungan Hidup	- Pengaturan kewajiban penyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan hidup - Pengurangan pemanasan global dengan meminimalisir efek gas rumah kaca maupun polusi udara. - Perlunya regulasi yang mengatur pembuangan limbah industri tidak langsung ke sungai/drainase, akan tetapi limbah harus diolah terlebih dahulu agar aman saat dibuang.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Lahan pasca tambang memiliki limbah logam berat yang dapat membahayakan ekosistem air apabila pengolahan limbah tidak dilakukan secara terpadu. - Beralih fungsinya kawasan lindung ke non lindung dapat berdampak pada terjadinya bencana alam.	Badan Lingkungan Hidup	- Pengawasan kualitas air sungai dan danau secara berkala - Pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup - Monitoring ketersediaan sarana pengolahan limbah di kawasan pertambangan - Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap kawasan lindung dan konservasi - Optimalisasi pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan, minimasi limbah, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum mengenai pembuangan limbah dan pengelolaan lingkungan



Indikasi Program	Dampak	SKPD	Rekomendasi
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	- Kegiatan pertambangan menghasilkan kolam bekas tambang yang perlu penanganan pascatambang - Proses reklamasi yang tidak sesuai prosedur menjadikan lahan pascatambang tidak produktif - Reklamasi yang tidak baik berakibat kemampuan lahan pasca tambang menurun dan membutuhkan biaya besar untuk rehabilitasi lahan	Badan Lingkungan Hidup	- Monitoring proses reklamasi lahan pascatambang - Pengawasan kualitas air dan tanah pada lahan di sekitar kawasan pertambangan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan harus mempertimbangkan pemilihan sampah organik dan anorganik guna mengurangi sampah yang tidak terurai oleh tanah apabila system persampahan menggunakan system landfill - Pelaksanaan bank sampah di setiap wilayah perlu digalakkan sebagai langkah awal untuk penerapan pengelolaan sampah oleh masyarakat
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	- Cakupan RTH perlu dijaga/dipertahankan 30% dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. - Pengembangan bentuk-bentuk RTH perlu dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memadukan fungsi pendukung yang lain (misal: RTH dengan fungsi taman, wisata, konservasi, dll) - Perlunya Ruang Terbuka Hijau pada kawasan hulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki fungsi sebagai resapan air
Pilihan Kehutanan			



Indikasi Program	Dampak	SKPD	Rekomendasi
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	- Pembukaan lahan hutan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan, maupun industri kehutanan dapat berakibat pada menurunnya sumberdaya hutan - Konflik kepentingan antara ekonomi dan ekologi	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan	- Pengawasan pemanfaatan lahan pada kawasan hutan lindung. - Memperketat pengawasan dan penegakan hukum di kawasan hutan konservasi/lindung, baik dengan bantuan polisi hutan maupun kearifan lokal. - Meminimalisir alih fungsi lahan melalui penguatan ijin.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	- Pembukaan lahan untuk pertambangan cenderung berakibat pada meningkatnya luasan lahan kritis. - Kerusakan hutan menyebabkan terganggunya ekosistem hutan, pencemaran udara akibat kebakaran hutan, menurunnya fungsi hutan sebagai daerah serapan karbon, bencana longsor dan banjir karena berkurangnya fungsi hutan sebagai daerah resapan air.		- Revegetasi lahan pascatambang. - Rehabilitasi lahan kritis.
Pilihan ESDM			
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Peningkatan konsumsi batubara dan migas untuk pengembangan bidang ketenagalistrikan		Pengembangan sumber energi terbarukan
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	- Kegiatan pertambangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lahan - Konflik sosial dengan masyarakat - Konflik pemanfaatan ruang antara fungsi budidaya dengan fungsi lindung		- Pengawasan yang ketat terhadap pengolahan limbah pertambangan - Pemberian IUP pertambangan harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas - Kegiatan pertambangan harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata - Sebisanya mungkin kegiatan penambangan tidak berada di kawasan lindung, tidak bersinggungan langsung dengan kawasan permukiman dan tidak mengganggu kegiatan pertanian



Indikasi Program	Dampak	SKPD	Rekomendasi
Program pembangunan jaringan listrik PLN	- Memicu terjadinya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi migas untuk bahan bakar listrik - Menimbulkan pencemaran lingkungan - Munculnya konflik sosial dan antar sektor - Mengubah pola permukiman	PLN	Program Pembangunan Jaringan listrik PLN memperhatikan penggunaan sistem teknologi ramah lingkungan, pengelolaan dan optimasi sumber daya, jalur pengembangan dan peraturan zonasi serta kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat
Urusan Wajib Sosial			
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	- Membuat penduduk malas untuk bekerja dan menunggu bantuan dari pemerintah - konflik sosial dan kecemburuan sosial	Dinas Sosial	- Validasi data sosial - Pemutakhiran data yang berbasis wilayah terkecil (desa/dusun) - Survei data sosial
Program Bedah Rumah	konflik sosial dan kecemburuan sosial	Dinas Sosial	
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	konflik sosial dan kecemburuan sosial	Dinas Sosial	

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan, dikarenakan dampaknya bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan dalam penyusunan perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, yaitu:

1. Peningkatan kinerja kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
3. Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan, serta dokumen perencanaan dan penganggaran.
4. Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.
5. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Sesuai dengan Misi ke-1 yang tertuang dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 yaitu **“MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT”** yang kemudian diturunkan dalam Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas dan melayani serta terbagi dalam 3 sasaran yaitu:

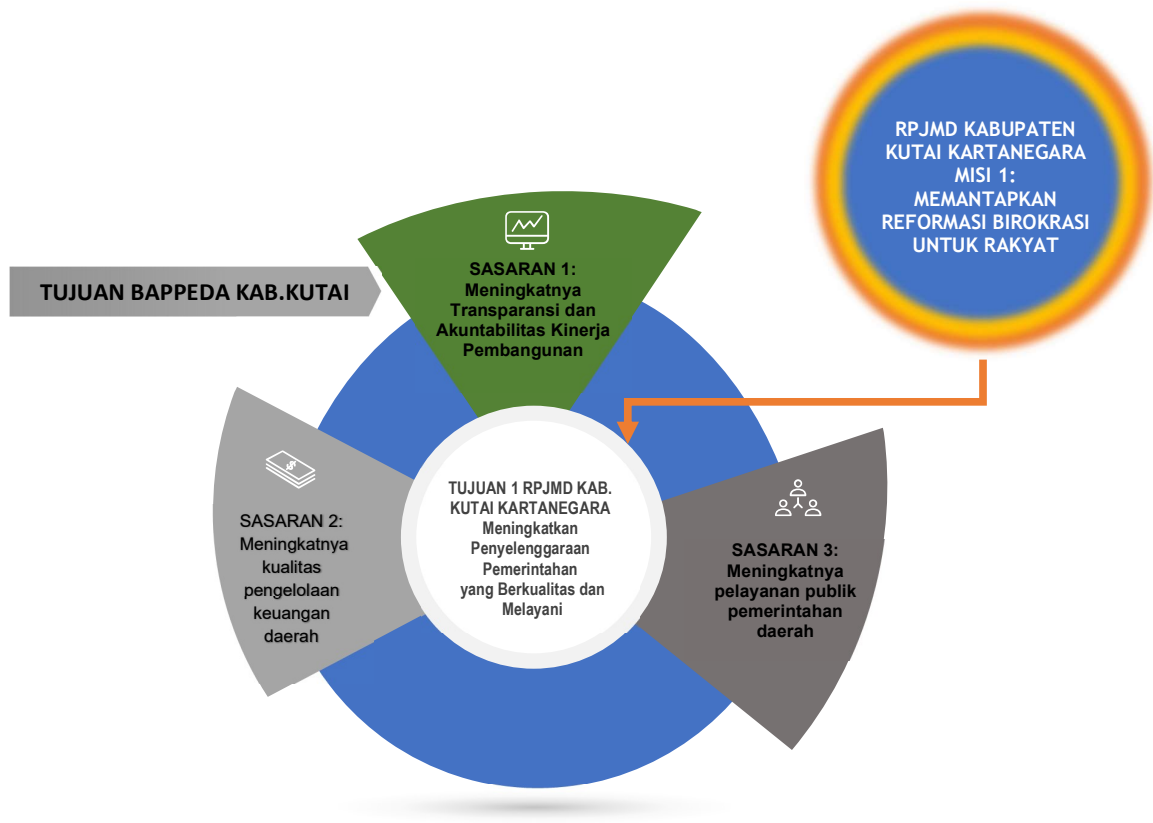
1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah

Maka pada logframe perencanaan integratif untuk pencapaian Misi 1 (satu) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, dapat dilihat bahwa BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas yang sesuai dengan sasaran ke-1 RPJMD dan di “Cascading” menjadi Tujuan dari BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu ***Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan*** dengan indikator kinerja ***Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah***.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD maka dilakukan perumusan perencanaan terintegrasi yang tergambar dalam logical framework sebagai berikut:



Gambar 4 Keterkaitan Tujuan Bappeda dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021



4.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda.
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Dalam sasaran terdapat Indikator terukur yang menjadi *Indikator Kinerja Utama* (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan



tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

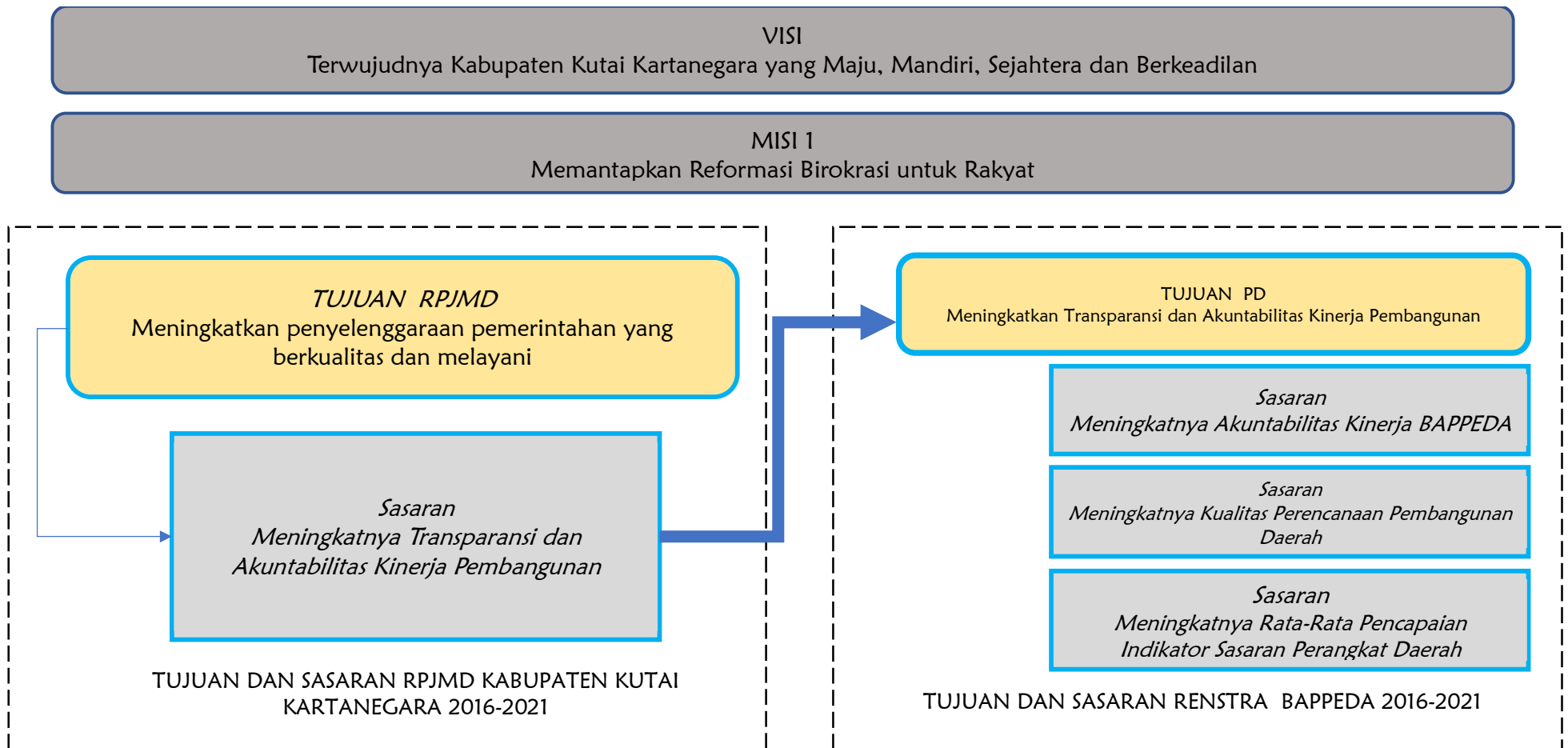
Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KETERANGAN
			2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah	B	B	BB	BB	A	Indikator Tujuan	
	1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	34,60	65	71	75	82	Indikator Kinerja Utama	
	1.2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi	-	3	3	2	1	Indikator Kinerja Utama	
	1.3. Meningkatkan Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	80	82	85	87	90	Indikator Kinerja Utama	

Keterkaitan secara linieritas Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD dan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari yang di emban BAPPEDA Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

5.1 STRATEGI 1 PENINGKATAN KAPASITAS BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

BAPPEDA dituntut kemampuannya untuk menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Strategi peningkatan kualitas kelembagaan dimaksudkan sebagai peningkatan kapasitas manajemen dan pelayanan administrasi serta evaluasi kinerja perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah. Arah kebijakan dari strategi peningkatan kualitas kelembagaan BAPPEDA adalah:

- Peningkatan Kapasitas manajemen dan pelayanan administrasi
- Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan perangkat daerah

5.2 STRATEGI 2 PENGUATAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

Perubahan paradigma perencanaan dan penganggaran money follow function menjadi money follow program membawa momentum perubahan dalam proses perencanaan di daerah. Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran sebagai suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran serta mengendalikan pencapaian sasaran pembangunan.

Strategi penguatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu di maksudkan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Adapun arah Kebijakan dari strategi penguatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu:

- Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran
- Optimalisasi implementasi regulasi sistem perencanaan pembangunan daerah
- Membangun sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi
- Optimalisasi kerjasama pembangunan
- Optimalisasi dukungan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah



5.3 STRATEGI 3 PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara fungsional dilaksanakan oleh BAPPEDA. Permasalahan pengendalian pembangunan adalah masih adanya Perangkat Daerah dalam perencanaan program hanya berdasar pada fungsinya semata dan kurang menunjang prioritas daerah, sehingga terjadi duplikasi kegiatan. Seharusnya saat ini menggunakan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Intergratif dan Spasial). Dengan demikian, dalam kerangka perencanaan dan penganggaran cenderung masih belum merefleksikan perencanaan strategis dengan pendekatan money follow program.

Strategi peningkatan capaian kinerja perangkat daerah dimaksudkan mengoptimalkan pengendalian perencanaan dalam rangka mencapai sasaran prioritas daerah serta untuk menjaga integrasi proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. Adapun arah kebijakan dari strategi peningkatan capaian kinerja perangkat daerah:

- Optimalisasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan SDA
- Optimalisasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan
- Optimalisasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana pengembangan wilayah

Tabel 12. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN								
MISI : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT								
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan	1.1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	1	Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	1	Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Pelayanan Administrasi
							2	Peningkatan Kualitas Perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan perangkat daerah
		1.2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Skala Regional/Provinsi.	2	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu	1	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
							2	Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran
							3	Optimalisasi implementasi regulasi sistem perencanaan pembangunan daerah
							4	Membangun sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi
							5	Optimalisasi kerjasama pembangunan
							6	Optimalisasi dukungan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah



VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN									
MISI : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT									
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
		1.4.	Meningkatnya Rata-rata Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	3	Peningkatan capaian kinerja perangkat daerah	1	Optimalisasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan SDA	
							2	Optimalisasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	
							3	Optimalisasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana pengembangan wilayah	



BAB VI

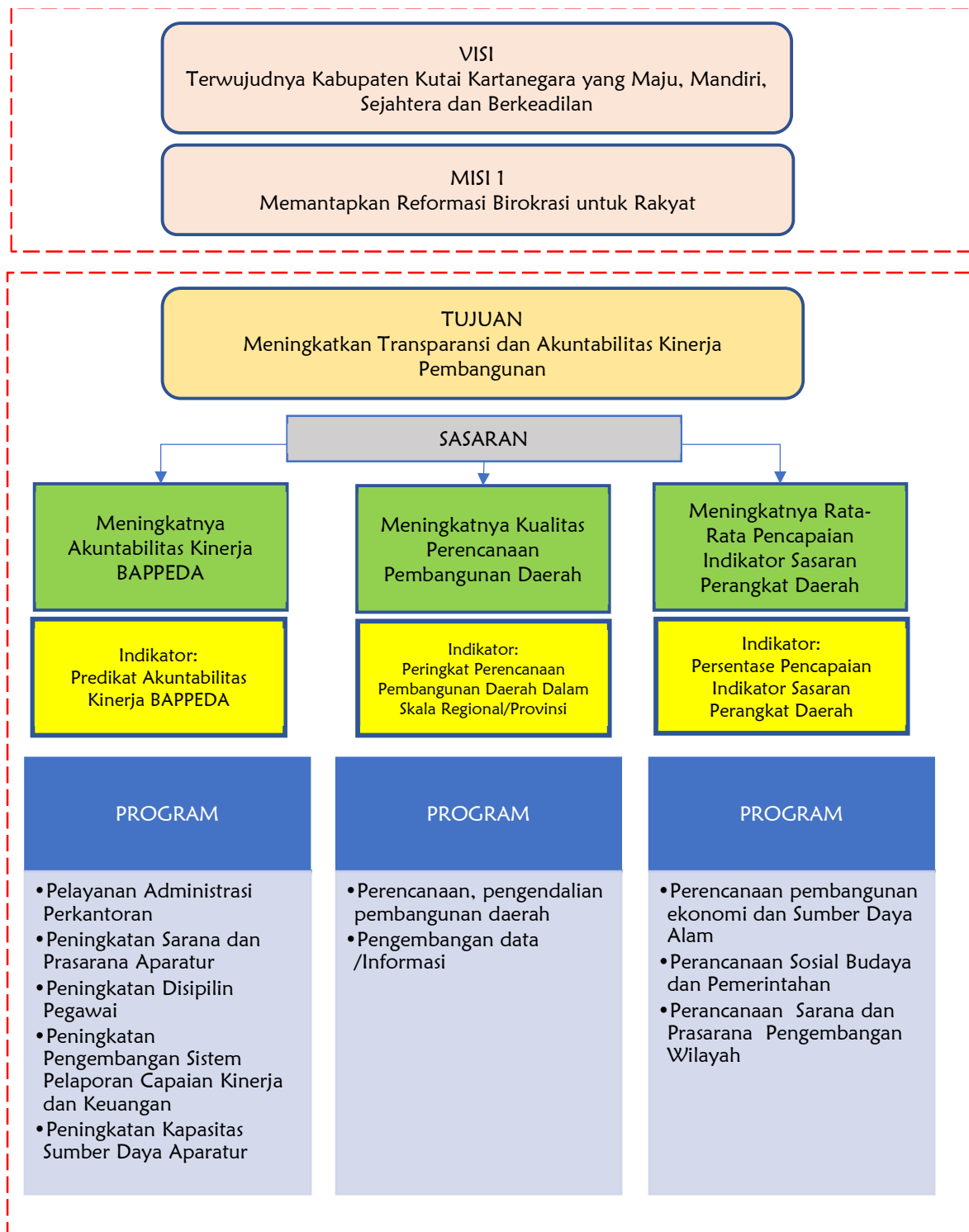
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah BAPPEDA memperhatikan pembagian kewenangan pada masing-masing urusan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda mengikuti kerangka logis (Logframe) yang secara terstruktur dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 6. Kerangka Logis Keterkaitan RPJMD dengan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara



7.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program sebagaimana dijelaskan dalam beberapa tabel berikut ini.

Tabel 13. Rencana Program dan Strategi Pertama

Sasaran		Meningkatnya Predikat Akuntabilitas OPD	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
S1: Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Pelayanan Publik			
1.	Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik
2.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan perangkat daerah	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pelanggaran disiplin ASN
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nilai Kinerja SKP
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja 2. Persentase tindak lanjut temuan Audit 3. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset

Tabel 14. Rencana Program dan Kegiatan Strategi Kedua

Sasaran		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
S2: Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu			
1.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian program antara RPJMD-RKPD
2.	Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran		Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD
3.	Optimalisasi implementasi regulasi sistem perencanaan pembangunan daerah		
4.	Membangun sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi		
5.	Optimalisasi kerjasama pembangunan		
6..	Optimalisasi dukungan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Program Pengembangan data/informasi	Tingkat ketersediaan data pembangunan



Tabel 15. Rencana Program dan Kegiatan Strategi Ketiga

Sasaran		Meningkatnya rata-rata Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
<i>S3: Peningkatan capaian kinerja perangkat daerah</i>			
1.	Optimisasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan SDA	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
2.	Optimisasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (Outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
3.	Optimisasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana pengembangan wilayah	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (Outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana pengembangan wilayah



**Tabel 16. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah			n/a	B		B		BB		A		A		A		Kabupaten	
Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA				B	34,60		65		71		75		82		82		Kepala Bappeda	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persen	100	100	3.515.158.813	100	3.667.881.532	100	4.902.097.700	100	4.773.060.236	100	4.439.530.548	100	21.297.728.829	Sekretaris	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	OPD Bappe da	bulan	12	48	1.106.320.641	48	1.274.922.892	48	1.703.751.000	12	1.703.751.000	12	1.703.751.000	168	7.492.496.533	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasio nal	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	OPD Bappe da	unit	11	11	13.267.500	11	13.581.500	10	23.760.500	9	23.625.000	9	85.125.000	50	159.359.500	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	OPD Bappe da	unit	n/a							82		82					
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OPD Bappe da	bulan	12	12	453.609.925	12	468.203.700	12	565.165.200	12	582.918.200	0	0	48	2.069.897.025	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA 2016-2021

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	OPD Bappe da	bulan	12	12	229.865.187	12	298.019.958	12	307.918.000	12	307.917.990	12	357.917.990	60	1.501.639.125	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jasa Perkantoran ATK yang disediakan	OPD Bappe da	bulan	n/a	1.500	161.152.180	1.500	168.772.650	20	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	3.044	929.924.830	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah penggandaan	OPD Bappe da	Lembar	36.50 0	49.23 6	159.270.628	49.23 4	85.732.800	44.73 1	144.578.000	70.0 00	94.901.800	70.0 00	94.901.800	283.2 01	579.385.028	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
	2. Jumlah Cetakan	OPD Bappe da	Eksempl ar	n/a							1.27 6		1.27 6		2.552			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	Jumlah Penyediaan penerangan bangunan kantor	OPD Bappe da	Jenis	12	12	19.768.000	12	36.066.125	12	36.752.000	0	0	0	0	36	92.586.125	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1. Jumlah bacaan yang disediakan	OPD Bappe da	Eksempl ar	7.000	0	0	3.000	105.000.000	3.000	150.000.000	3.00 0	150.000.000	3.00 0	150.000.000	12.00 0	555.000.000	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
	2. Jumlah Kontrak Advetorial	OPD Bappe da	Advetori al	n/a							9		9		9			
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	OPD Bappe da	porsi	16.00 0	11.70 8	271.435.000	11.70 0	257.775.000	8.108	300.000.000	2.08 0	317.526.206	2.08 0	317.526.206	35.67 6	1.464.262.412	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
	Jumlah Kotak makanan dan minuman yang disediakan	OPD Bappe da	Kotak	n/a							9.50 0		9.50 0		19.00 0			

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	OPD Bappe da	orang/H ari	172	150	911.591.672	150	768.870.347	150	823.038.000	150	823.038.000	150	823.038.000	750	4.149.576.019	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS	OPD Bappe da	bulan	12	12	188.878.080	12	190.936.560	216	239.000.000	12	176.322.240	12	314.210.752	264	1.109.347.632	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah layanan arsip record center	OPD Bappe da	unit	n/a							1	393.059.800	1	393.059.800	2	786.119.600	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
	Jumlah layanan arsip file center	OPD Bappe da	unit	n/a							5		5		10			
Fasilitasi Rapat Koordinasi Perencanaan/B APPEDA se Kaltim Tahun 2019	Jumlah Even dilaksanakan	ASN Bappe da	kegiatan	n/a	0	0	0	0	1	408.135.000	0	0	0	0	1	408.135.000	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik		Persen	n/a	69	804.348.202	71	647.181.555	73	1.448.519.286	77	3.153.491.300	82	2.506.271.900	82	8.559.812.243	Sekretaris	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	OPD Bappe da	jenis	n/a	9	234.113.200	3	14.595.600	10	365.962.400	7	671.820.600	7	671.820.600	36	1.958.312.400	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	OPD Bappe da	jenis	16	0	0	0	0	2	57.895.600	0	0	0	0	2	57.895.600	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Di Pelihara	OPD Bappe da	unit	3	3	177.676.698	3	257.294.538	3	361.405.175	1	949.846.200	1	949.846.200	11	2.696.068.811	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah unit Kendaraan	OPD Bappe da	unit	n/a	0	0	0	0	0	0	1	547.219.400	0	0	1	547.219.400	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	OPD Bappe da	unit	1	0	0	0	0	1	64.318.406	2	95.580.000	2	95.580.000	5	255.478.406	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal	Jumlah kendaraan operasional	OPD Bappe da	unit	10	10	95.746.700	10	127.432.617	9	150.000.000	7	150.422.000	7	150.422.000	43	674.023.317	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	OPD Bappe da	Jenis	7	7	215.503.804	7	247.858.800	8	398.937.705	12	638.603.100	8	638.603.100	42	2.139.506.509	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Pengembangan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Pengembanga n bangunan gedung kantor	OPD Bappe da	unit	n/a	1	81.307.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1	81.307.800	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Inventarisasi dan Penilaian Asset Bappeda	Jumlah Dokumen Laporan Penilaian Asset	OPD Bappe da	Dokume n	n/a	0	0	0	0	1	50.000.000	1	100.000.000	0	0	2	150.000.000	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN		Persen	n/a	15	0	10	0	8	0	5	690.836.599	3	150.000.000	3	840.836.599	Sekretaris	



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian BAPPEDA	Jumlah Sistem Informasi	OPD Bappe da	sistem	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	Kasubag Kepegawaian	Tengg arong
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanny a	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	ASN Bappe da	Stel	n/a	0	0	0	0	0	158	130.924.699	0	0	158	130.924.699	Kasubag Kepegawaian	Tengg arong	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan	ASN Bappe da	Stel	n/a	0	0	0	0	0	632	559.911.900	0	0	632	559.911.900	Kasubag Kepegawaian	Tengg arong	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP		Nilai Rata- Rata	n/a	83	0	83	0	84,12	300.000.000	84,4 4	509.163.200	85	1.009.163.200	85	1.818.326.400	Sekretaris	
Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan,kurs us dan bimtek	ASN Bappe da	Orang	n/a	0	0	0	0	25	200.000.000	50	409.163.200	50	409.163.200	125	1.018.326.400	Kasubag Kepegawaian	Tengg arong
Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, kursus, dan bimtek	ASN Bappe da	Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	50	500.000.000	50	500.000.000	Kasubag Kepegawaian	Kukar/ Luar Daera h
Fasilitasi Bekias	Jumlah Dokumen	OPD Bappe da	Dokume n	n/a	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Kasubag Kepegawaian	Tengg arong



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit		1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	0	1. 100 2. 100 3. 100	638.243.250	1. 100 2. 100 3. 100	205.145.200	1. 100 2. 100 3. 100	755.366.531	1. 100 2. 100 3. 100	725.000.000	1. 100 2. 100 3. 100	1.957.918.200	1. 100 2. 100 3. 100	4.281.673.181	Sekretaris	
Penyusunan Dokumen Perencanaan , Evaluasi Kinerja Program Kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Dokumen	OPD Bappeda	dokume n	n/a	0	0	0	0	15	284.834.800	0	0	0	0	15	284.834.800	Kasubag Program dan Keuangan	Tengg arong
Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Bappeda	Jumlah Dokumen	OPD Bappeda	dokume n	n/a	0	0	0	0	0	0	12	425.000.000	12	425.000.000	24	850.000.000	Kasubag Program dan Keuangan	Tengg arong
Publikasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Event yang diikuti	ASN/Masyarakat	Event/k egiatan	2	0	0	0	0	0	0	2	100.000.000	2	200.000.000	4	300.000.000	Kasubag Program dan Keuangan	Tengg arong
Penyusunan Revisi dokumen Renstra	Jumlah Dokumen	OPD Bappeda	dokume n	1	1	218.243.250	0	0	0	0	0	0	0	0	1	218.243.250	Kasubag Program dan Keuangan	Tengg arong
Penyusunan Final Revisi dokumen Renstra	Jumlah Revisi Dokumen Renstra	OPD Bappeda	dokume n	n/a	0	0	1	112.085.200	0	0	0	0	0	0	1	112.085.200	Kasubag Program dan Keuangan	Tengg arong



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	Jumlah penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga yang diselesaikan	Masyar akat	dokume n	n/a	1	420.000.000	1	93.060.000	1	470.531.731	0	0	0	0	3	983.591.731	Kasubag Program dan Keuangan	Tengg arong
Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD)	Jumlah Dokumen	OPD Bappe da	dokume n	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	1	450.000.000	1	450.000.000	Kasubag Program dan Keuangan	Tengg arong
Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja PD Bappeda	Jumlah Dokumen	OPD Bappe da	dokume n	n/a	0	0	0	0	0	0	8	200.000.000	8	200.000.000	16	400.000.000	Kasubag Program dan Keuangan	Tengg arong
Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	OPD Bappe da	dokume n	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	1	474.654.400	1	474.654.400	Kasubag Program dan Keuangan	Tengg arong
Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan BMD	OPD Bappe da	dokume n	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	5	208.263.800	5	208.263.800	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Tengg arong
Program pengembangan data/informasi	Tingkat keterisian Data Pembanguna n		persen	34	45	718.399.500	60	318.823.524	75	600.000.000	0	0	0	0	0	1.637.223.024	Sekretaris	
Penyusunan Profil Daerah (Sistem Informasi Pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Profil Kabupaten Kutai Kartanegara	ASN/M asyarak at	dokume n	n/a	1	182.475.600	1	318.823.524	1	400.000.000	0	0	0	0	3	901.299.124	Kasubag Program dan Keuangan	Tengg arong

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan	Jumlah kegiatan pengelolaan studio data dan pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan	ASN/Masyarakat	kegiatan	n/a	7	535.923.900	0	0	7	200.000.000	0	0	0	0	14	735.923.900	Kasubag Program dan Keuangan	Tenggarong
Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Skala Regional/Provinsi				n/a	3		3		2		1		1		1			
Program perencanaan pembangunan daerah	1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD; 2) Tingkat Capaian Kinerja Fisik Pembangunan Daerah		1) Persen; 2) Persen.	1. 70 2. 70	1. 79 2. 75	4.102.696.003	1. 75 2. 75	2.376.972.900	0	0	0	0	0	0	1. 90 2. 85	6.479.668.903	Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	
Revisi RPJMD	Jumlah Dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen	n/a	0	0	1	534.006.571	0	0	0	0	0	0	1	534.006.571	Kasubbid Perencanaan Pembangunan Daerah	Kukar
Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	Jumlah Dokumen Laporan fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	ASN/Masyarakat	dokumen	16	13	1.078.508.595	13	825.209.973	0	0	0	0	0	0	26	1.903.718.568	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyusunan dan penetapan RKPD dan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	ASN/M asyarak at	dokume n	2	2	821.453.373	2	602.657.056	0	0	0	0	0	0	4	1.424.110.429	Kasubbid Perencanaan Pembanguna n Daerah	Kukar
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungja waban (LKPI)	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungja waban (LKPI)	ASN/M asyarak at	dokume n	2	2	99.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	99.700.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar/ LuarDa erah
Fasilitasi Laporan Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran	ASN/M asyarak at	dokume n	1	1	90.245.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1	90.245.600	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar/ LuarDa erah
Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	ASN/M asyarak at	dokume n	4	4	382.811.938	4	415.099.300	0	0	0	0	0	0	8	797.911.238	Kepala Sub Bid. Pembiayaan Pembanguna n Daerah	Kukar/ LuarDa erah
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD	ASN/M asyarak at	dokume n	4	2	81.453.945	0	0	0	0	0	0	0	0	2	81.453.945	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar/ LuarDa erah
Fasilitasi Pangripta Nusantara dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Pangripta Nusantara	ASN/M asyarak at	dokume n	1	1	70.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	70.300.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar/ LuarDa erah

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Evaluasi Kegiatan Tahun Jamak	Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan Tahun Jamak	ASN/M asyarak at	dokume n	n/a	1	71.476.448	0	0	0	0	0	0	0	0	1	71.476.448	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar/ LuarDa erah
Review RPJMD	Jumlah Dokumen Review RPJMD	ASN/M asyarak at	dokume n	n/a	1	335.029.162	0	0	0	0	0	0	0	0	1	335.029.162	Kasubbid Perencanaan Pembanguna n Daerah	Kukar
Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	ASN/M asyarak at	dokume n	1	1	295.920.517	0	0	0	0	0	0	0	0	1	295.920.517	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar/ LuarDa erah
Penyusunan Laporan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah (LPPD)	ASN/M asyarak at	dokume n	1	1	775.796.425	0	0	0	0	0	0	0	0	1	775.796.425	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar/ LuarDa erah
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Fisik Pembanguna n Daerah		persen	70	79.02	0	75	1.156.224.361	0	0	0	0	0	0	5	1.156.224.361	Kabid Perencanaan dan Pengendalia n Pembanguna n Daerah	
Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	ASN/M asyarak at	dokume n	1	0	0	2	556.369.338	0	0	0	0	0	0	2	556.369.338	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyusunan Laporan Penyelenggara an Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah (LPPD)	ASN/M asyarakat	dokume n	1	0	0	2	299.216.211	0	0	0	0	0	0	2	299.216.211	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar
Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah Rekomendasi Dewan Riset Daerah	Dewan Riset Daerah	dokume n	n/a	0	0	1	300.638.812	0	0	0	0	0	0	1	300.638.812	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar
Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah	1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD; 2) Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD		1) Persen; 2) Persen.	1. 79.02 2. 70.91	1. 79.02 2. 97.19	0	1. 75 2. 83.64	0	1. 100 2. 98	4.089.850.000	1. 100 2. 99	4.938.850.000	1. 100 2. 99	4.439.850.000	1. 100 2. 99	13.468.550.000	Kabid Perencanaan dan Pengendalia n Pembanguna n Daerah	
Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	Jumlah Dokumen fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	ASN/M asyarakat	dokume n	16	0	0	0	0	2	950.000.000	0	0	0	0	2	950.000.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar/ Luar daerah
Penyusunan dan penetapan RKPD dan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	ASN/M asyarakat	dokume n	2	0	0	0	0	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	6	2.100.000.000	Kasubbid Perencanaan Pembanguna n Daerah	Kukar/ Luar daerah
Penyusunan RPJMD Teknokratik	Jumlah Dokumen RPJMD Teknokratik	ASN/M asyarakat	dokume n		0	0	0	0	0	0	1	749.000.000	0	0	1	749.000.000	Kasubbid Perencanaan Pembanguna n Daerah	Kukar/ Luar daerah



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	ASN/M asyarakat	dokume n	4	0	0	0	0	4	400.000.000	8	1.350.000.000	8	1.350.000.000	20	3.100.000.000	Kasubbid. Perencanaan Pembiayaan Pembanguna n Daerah	Kukar/ Luar daerah
Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RPJMD	ASN/M asyarakat	dokume n	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	800.000.000	1	800.000.000	Kasubbid Perencanaan Pembanguna n Daerah	Kukar/ Luar daerah
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD	ASN/M asyarakat	dokume n	4	0	0	0	0	0	0	2	150.000.000	2	150.000.000	4	300.000.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar
Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah pendampinga n sistem informasi perencanaan	ASN/M asyarakat	OPD	n/a	0	0	0	0	58	389.850.000	58	389.850.000	58	389.850.000	174	1.169.550.000	Kasubbid Perencanaan Pembanguna n Daerah	Kukar/ Luar daerah
	2. Jumlah penerapan sistem informasi perencanaanD aerah		Aplikasi						1		1		1		3			
Evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	Jumlah Dokumen Evaluasi Dokumen RPJMD	ASN/M asyarakat	dokume n	n/a	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	1	300.000.000	Kasubbid Perencanaan Pembanguna n Daerah	Kukar/ Luar daerah



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD	ASN/M asyarak at	dokume n	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	Kasubbid Perencanaan Pembanguna n Daerah	Kukar/ Luar daerah
Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	ASN/M asyarak at	dokume n	1	0	0	0	0	2	650.000.000	2	650.000.000	0	0	4	1.300.000.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar
Penyusunan Laporan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah (LPPD)	ASN/M asyarak at	dokume n	1	0	0	0	0	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	6	1.350.000.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar
Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah Dokumen	Dewan Riset Daerah	dokume n	n/a	0	0	0	0	10	550.000.000	0	0	0	0	10	550.000.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Kukar
Pengelolaan dan Pemeliharaan Studio Data Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data Bidang Perencanaan	ASN/M asyarak at	Data Bidang Perenca naan		0	0	0	0	0	0	3	200.000.000	3	200.000.000	6	400.000.000	Kasubbid. Perencanaan Pembiayaan Pembanguna n Daerah	Tengg arong
Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah				n/a	80		82		85		87		90		90			



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rata-Rata Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		Persen	80,71	86	737.272.667	90	1.072.049.784								1.809.322.451	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi	
Koordinasi & Fasilitasi Perencanaan SDA dan Pertanian	Jumlah dokumen	ASN/M asyarak at	dokume n	30	10	243.824.367	5	249.925.000							15	493.749.367	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam	Kukar/ Luar daerah
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah dokumen	ASN/M asyarak at	dokume n	3	1	245.980.000	1	224.918.522							2	470.898.522	Kepala Sub Bid. Perencanaan PDU dan Pariwisata	Kukar/ Luar daerah
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen	ASN/M asyarak at	dokume n	n/a	1	247.468.300	1	184.406.000							2	431.874.300	Kepala Sub Bid. Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	Kukar/ Luar daerah
Evaluasi dan Perubahan Rencana Induk (Grand Desain) Pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen	ASN/M asyarak at	dokume n	n/a	0	0	1	236.702.704							1	236.702.704	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam	Kukar



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen	ASN/M asyarakat	dokume n	n/a	0	0	1	176.097.558							1	176.097.558	Kepala Sub Bid. Perencanaan PDU dan Pariwisata	Kukar
Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		Persen	80,71	0	0	0	0	93	1.100.000.000	95	1.100.000.000	97	1.387.667.488	97	3.587.667.488	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi	
Koordinasi & Fasilitasi Perencanaan SDA dan Pertanian	Jumlah dokumen	ASN/M asyarakat	dokume n	30	0	0	0	0	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	15	1.200.000.000	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam	Kukar/ Luar daerah
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah dokumen	ASN/M asyarakat	dokume n	3	0	0	0	0	4	400.000.000	3	400.000.000	5	400.000.000	12	1.200.000.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan PDU dan Pariwisata	Kukar/ Luar daerah



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren cana n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen	ASN/M asyarakat	dokume n	n/a	0	0	0	0	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	Kukar/ Luar daerah
Analisis Data Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen	ASN/M asyarakat		n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	1	287.667.488,00		287.667.488	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam	Kukar
Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur	Rata-Rata Tingkat capaian pembanguna n Bidang Pemerintahan dan Aparatur		persen	70	75	314.814.922	0	0	0	0	0	0	0	0	75	314.814.922		
Coaching Clinic Penyusunan RPJM Desa	Jumlah Desa		desa	n/a	35	273.428.922	0	0	0	0	0	0	0	0	35	273.428.922		
Fasilitasi dan Koordinasi Aksi pencegahan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi Aksi pencegahan Pemberantasa n Korupsi Tahun 2016		dokume n	4	1	41.386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	41.386.000		



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Rata-Rata Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembang an Wilayah		Persen	61,00	77	937.620.692	81	708.513.123	0	0	0	0	0	0	0	1.646.133.815	Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembang an Wilayah	
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Jumlah dokumen	ASN/M asyarakat	dokume n/urusa n	n/a	25	296.053.350	14	305.671.500	0	0	0	0	0	0	39	601.724.850	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Kukar/ Luar daerah
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen	ASN/M asyarakat	dokume n/urusa n	n/a	25	209.680.200	21	239.329.700	0	0	0	0	0	0	46	449.009.900	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pembanguna n Wilayah Kecamatan	Kukar/ Luar daerah
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah dokumen	ASN/M asyarakat	dokume n/urusa n	n/a	25	122.243.292	35	163.511.923	0	0	0	0	0	0	60	285.755.215	Kepala Sub Bid. Perencanaan Infrastruktur	Kukar/ Luar daerah
Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	ASN/M asyarakat	dokume n	n/a	1	243.083.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1	243.083.600	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Kukar



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	Jumlah Dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Kukar
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen	n/a	1	66.560.250	0	0	0	0	0	0	0	0	1	66.560.250	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Kukar
Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah		Persen	61,00	77	0	81	0	84	1.250.000.000	86	950.000.000	88	950.000.000	88	3.150.000.000	Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Jumlah dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen/urusan	n/a	0	0	0	0	5	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	9	1.050.000.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Kukar/ Luar daerah

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen	ASN/M asyarak at	dokume n/urusa n	n/a	0	0	0	0	1	350.000.000	18	350.000.000	18	350.000.000	37	1.050.000.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pembanguna n Wilayah Kecamatan	Kukar/ Luar daerah
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infracrtuktur Wilayah	Jumlah dokumen	ASN/M asyarak at	dokume n/urusa n	n/a	0	0	0	0	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	6	750.000.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan Infrastruktur	Kukar/ Luar daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	Jumlah Dokumen	ASN/M asyarak at	dokume n	n/a	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	1	300.000.000	Kepala Sub Bid. Perencanaan Pembanguna n Wilayah Kecamatan	Kukar
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rata-Rata Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan		Persen	85,58	89	2.092.549.233	90	447.311.150	0	0	0	0	0	0	0	2.539.860.383	Kepala Bidang Perencanaan Sosbud & Pemerintaha n	
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah dokumen	ASN/M asyarak at	dokume n/urusa n		13	88.593.100	11	164.220.000	0	0	0	0	0	0	24	252.813.100	Kasubbid Perencanaan Pengembang an PA	Kutai Kartan egara



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Jumlah dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen/urusan	2	1	142.122.600	1	120.800.800	0	0	0	0	0	0	2	262.923.400	Kasubbid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Kutai Kartanegara
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen/urusan	1	1	184.183.100	1	162.290.350	0	0	0	0	0	0	2	346.473.450	Kasubbid Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Kutai Kartanegara
Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen	1	30	130.554.610	0	0	0	0	0	0	0	0	30	130.554.610	Kasubbid Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Kutai Kartanegara
Penyusunan Road Map Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen	n/a	1	448.760.650	0	0	0	0	0	0	0	0	1	448.760.650	Kasubbid Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Kutai Kartanegara
Pembuatan Album Kemiskinan yang bersinergi dengan pengembangan Software	Jumlah Dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen	n/a	1	332.241.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1	332.241.500	Kasubbid Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Kutai Kartanegara



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulanga n Kemiskinan Daerah (TKPK)	Jumlah Dokumen	ASN/M asyarak at	dokume n	10	2	220.508.003	0	0	0	0	0	0	0	0	2	220.508.003	Kasubbid Perencanaan Sosial Kemasyaraka tan dan Kesejahteraa n Rakyat	Kutai Kartan egara
Penyusunan Dokumen Indeks Partispasi Masyarakat (IPM)	Jumlah dokumen Indeks Partisipasi Masyarakat	ASN/M asyarak at	dokume n	n/a	1	544.635.670	0	0	0	0	0	0	0	0	1	544.635.670	Kasubbid Perencanaan Pengembang an Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Kutai Kartan egara
Analisa Jaminan Santunan Korban	Jumlah Dokumen	ASN/M asyarak at	dokume n	n/a	1	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	950.000	Kasubbid Perencanaan Pengembang an Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Kutai Kartan egara
Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcame) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan		Persen	85,58					91	2.200.000.000	92	2.200.000.000	93	2.200.000.000	93	6.600.000.000	Kepala Bidang Perencanaan Sosbud & Pemerintaha n	
Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi	Jumlah dokumen	ASN/M asyarak at	dokume n	n/a	0	0	0	0	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	3	1.050.000.000	Kasubbid Perencanaan Pengembang an PA	Kutai Kartan egara



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen/urusan		0	0	0	0	10	600.000.000	13	400.000.000	13	400.000.000	36	1.400.000.000	Kasubbid Perencanaan Pengembangan PA	Kutai Kartanegara
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Jumlah dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen/urusan	2	0	0	0	0	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	9	1.050.000.000	Kasubbid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Kutai Kartanegara
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen/urusan	1	0	0	0	0	6	350.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000	18	1.050.000.000	Kasubbid Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Kutai Kartanegara
Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Dewan Riset Daerah	Dewan Riset Daerah	dokumen	n/a	0	0	0	0	0	0	10	550.000.000	10	550.000.000	20	1.100.000.000	Kasubbid Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Kutai Kartanegara
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK)	Jumlah Dokumen	ASN/Masyarakat	dokumen	10	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	Kasubbid Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Kutai Kartanegara



Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progr am (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021					
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs	Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs	ASN/M asyarakat	dokume n	n/a	0	0	0	0	1	350.000.000	0	0	0	0	1	350.000.000	Kasubbid Perencanaan Pengembang an Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Kutai Kartan egara
						13.861.103.282		10.600.103.129		16.645.833.517		19.040.401.335		19.040.401.336		79.187.842.599		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.

Perencanaan indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcome) tahun 2016-2021, yaitu merupakan realisasi kinerja yang telah dicapai. Tahun 2018-2021 merupakan target kinerja yang direncanakan di tuangkan.

Indikator kinerja Bappeda yang merupakan indikator kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan indikator program yang dilaksanakan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 17. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	n.a	n.a	65	71	75	82	82
2	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Skala Regional/Provinsi	n.a	n.a	3	3	2	1	1
3	Tingkat kesesuaian antara RPJMD-RKPD (%)	70	79	75	100	100	100	100
4	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (%)	81	86	90	93	95	97	97
5	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (%)	86	89	90	91	92	93	93
6	Persentase Tingkat capaian Indikator Program	61	77	81	84	86	88	88

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	(outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah (%)							



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan percepatan pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Kinerja Bappeda Tahun 2016-2017 yang tercantum dalam dokumen ini merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja tahun 2020-2021.

Perubahan Renstra Bappeda ini selanjutnya menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan menjadi pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020-2021 serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi 2022. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan perubahan Renstra Bappeda, maka diperlukan penyesuaian terhadap penjabaran Renstra kedalam Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Tahun 2020-2021 dan masa transisi tahun 2022.

Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target/rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir renstra tahun 2021.

Tenggarong,

2019

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Wiyono, S.I.P, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690204 199003 1 009

